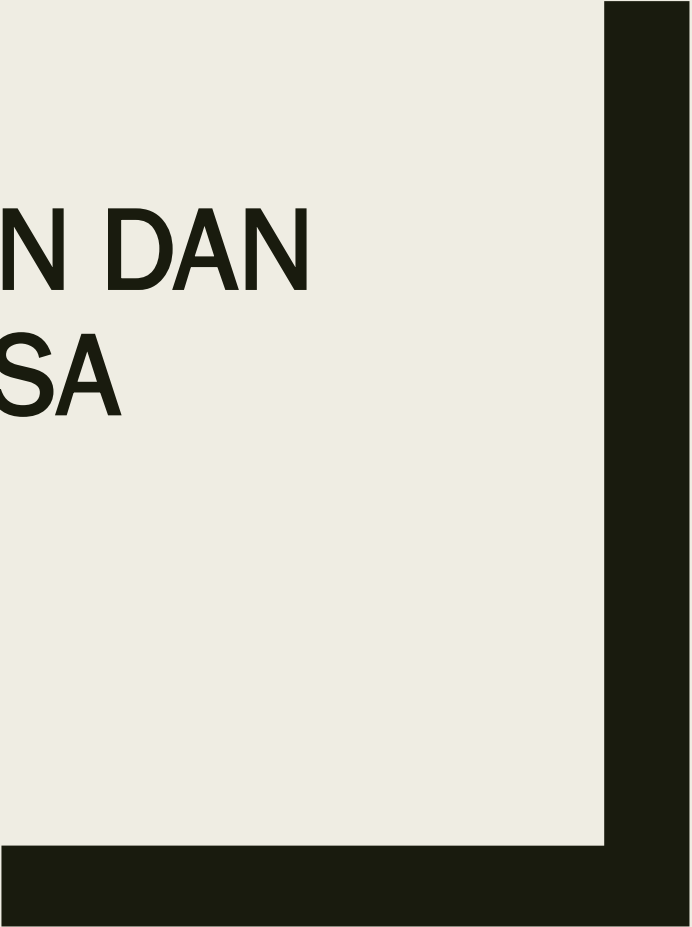


**INOVASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBANGUNAN DESA**



OUTLINE:

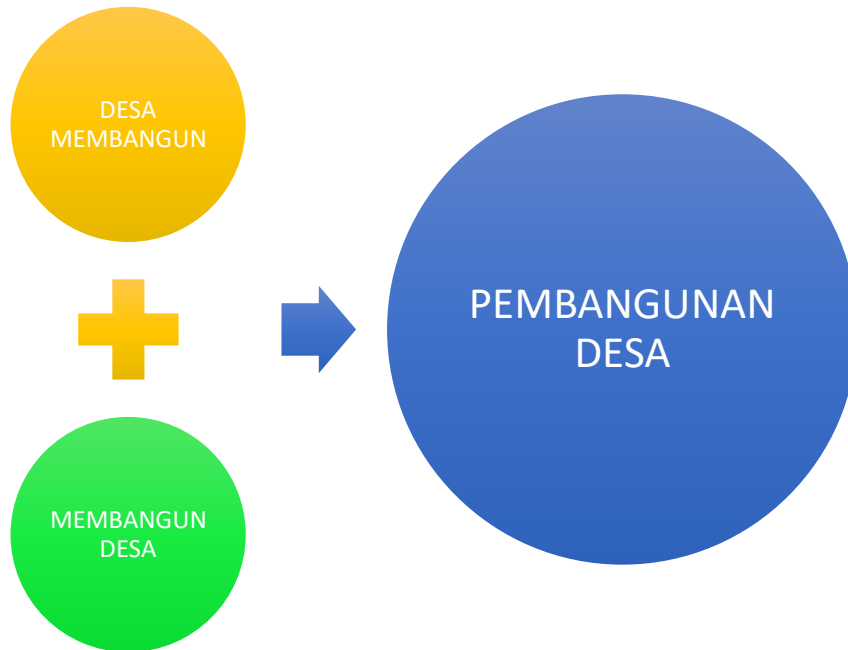
- Memahami Tujuan Pembangunan Desa
- Mengukur Perkembangan Pembangunan Desa
- Inovasi dalam Pemberdayaan dan Pembangunan Desa

MEMAHAMI TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

- Memahami kerangka konsep perspektif Pembangunan Desa
- Memahami Tujuan Pembangunan Desa
- Memahami Instrumen Pembangunan Desa

KERANGKA KONSEP (Penjelasan UU Nomor 6/2014)

PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DESA



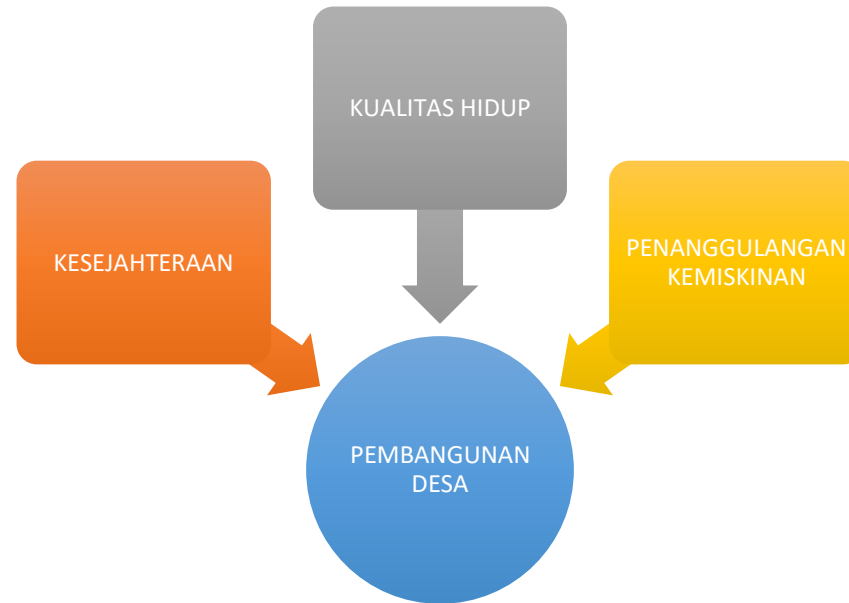
STAKEHOLDER

PEMBANGUNAN DESA

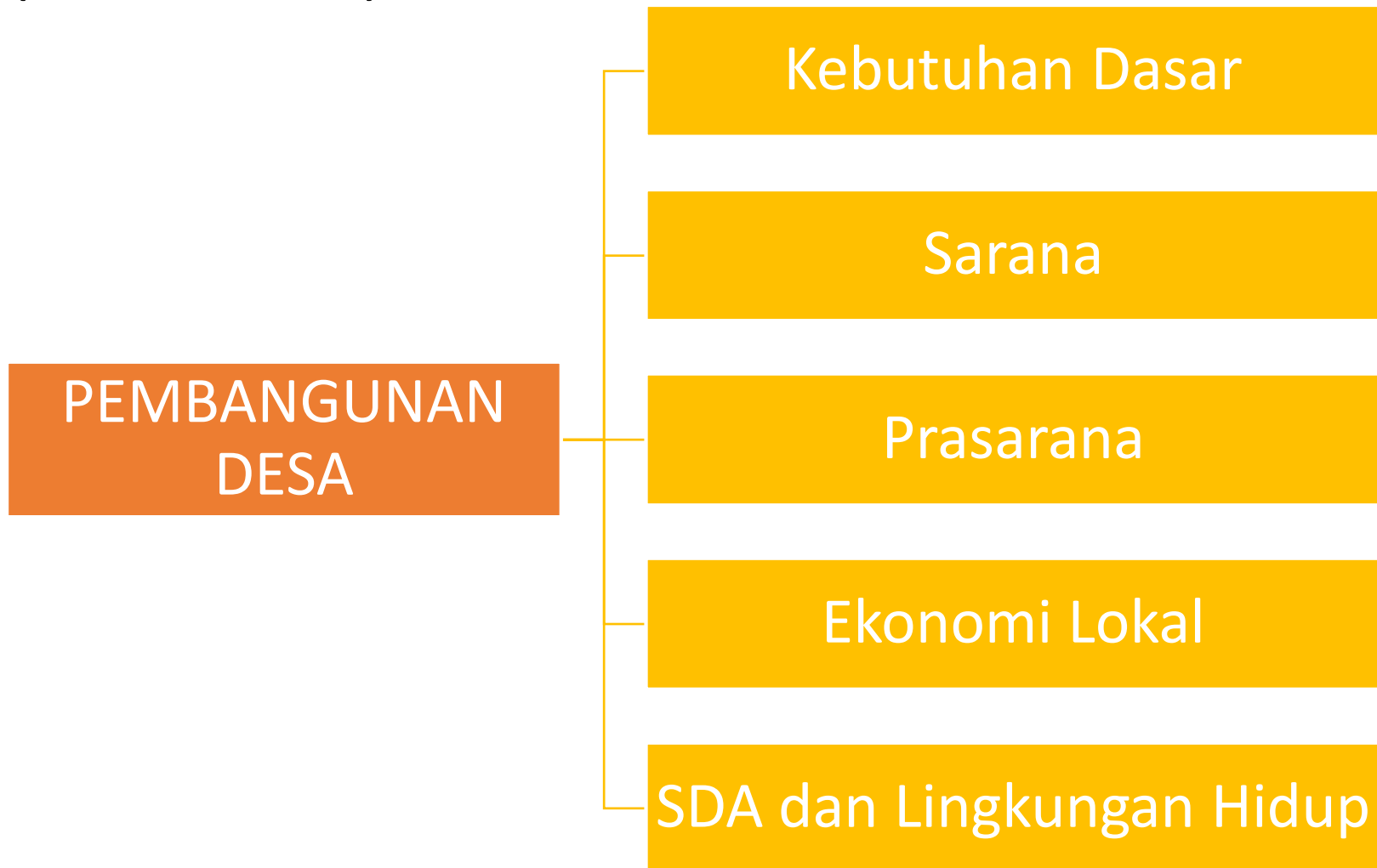
- **MEMBANGUN Desa**- Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa, Pasal 7 ayat (1)
- **DESA Membangun**-Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (Pasal 18)

TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pasal 78)

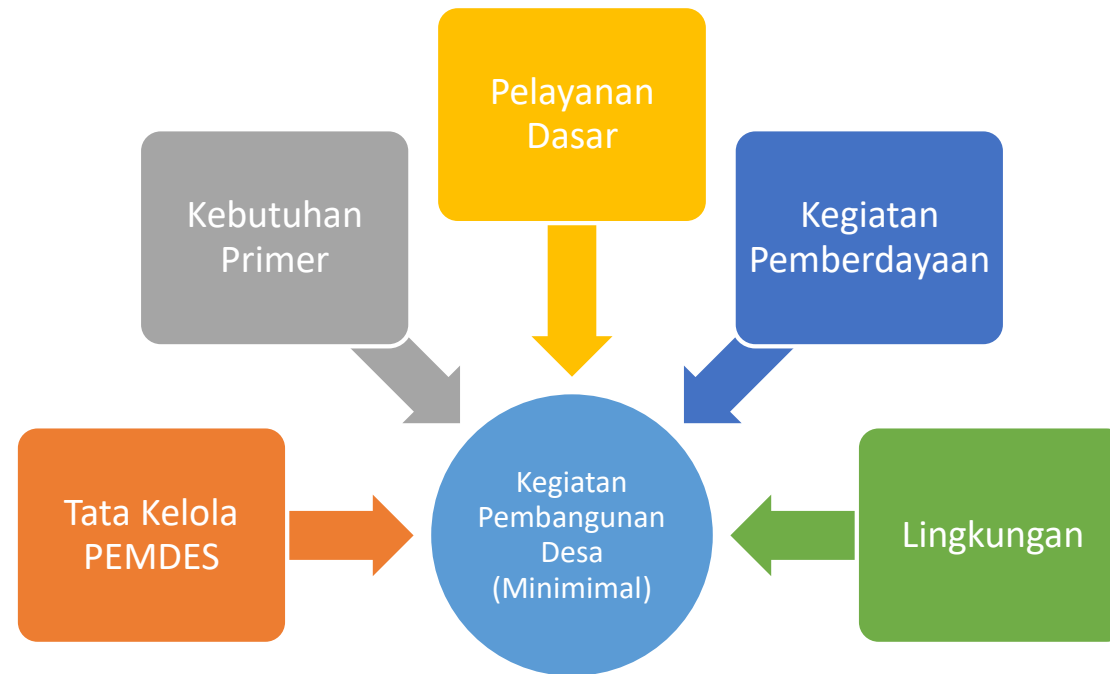


TOOLS/INSTRUMENTASI PEMBANGUNAN DESA (Pasal 78)



KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (Pasal 74 ayat 2)

- meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.



KEBUTUHAN DASAR

(Kebutuhan Primer)

- Dalam hal ini “kebutuhan primer” pada penjelasan pasal 74 (2) disamakan dengan istilah “kebutuhan dasar” pada pasal 78 (1) tentang tujuan pembangunan desa.
- Dengan demikian “kebutuhan dasar” terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
 - Kebutuhan Pangan adalah dimensi “kedaulatan pangan”
 - Kebutuhan Sandang adalah dimensi “Kemampuan daya Beli Masyarakat Terhadap Sandang & Ketersediaan Akses Terhadap Sarana/ Pasar Penyedia Sandang”.
 - Kebutuhan Papan adalah Dimensi “Ketersediaan Sarana Perumahan Sehat Seperti Ketersediaan Jamban, Pembuangan Sampah, Air Bersih, & Penerangan”.

Pelayanan Dasar (Penjelasan P. 74 (2))

- Dalam Hal ini yang dimaksud dengan “Pelayanan Dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar
 - Pendidikan adalah “Dimensi Ketersediaan/Aksesibilitas masyarakat kepada sarana pendidikan (Gedung Sekolah) Mulai dari pendidikan Pra-Sekolah; SD; SMP; SMA & Pendidikan Luar Sekolah”
 - Kesehatan adalah” Dimensi ketersediaan/ aksesibilitas masyarakat kepada sarana kesehatan (Rumah Sakit; Puskesmas; Pustu; Balai Pengobatan; Apotik; Toko Obat; dst)”
 - Infrastruktur Dasar adalah “Dimensi ketersediaan desa terhadap jalan, jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan irigasi”.

Tata Kelola Pemdes (P. 18 (1); BAB V)

- Dalam Hal ini Tata Kelola Pemerintahan Desa adalah “Dimensi Kapasitas Pemerintahan Desa dalam melayani **Barang Publik**.”
- Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- Pemerintah Desa adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”
- Pemerintah Desa terdiri dari “Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa”
- **Kapasitas adalah “Dimensi Ketersediaan SDM; Kelembagaan (Tertib Organisasi & Tertib Administrasi).**

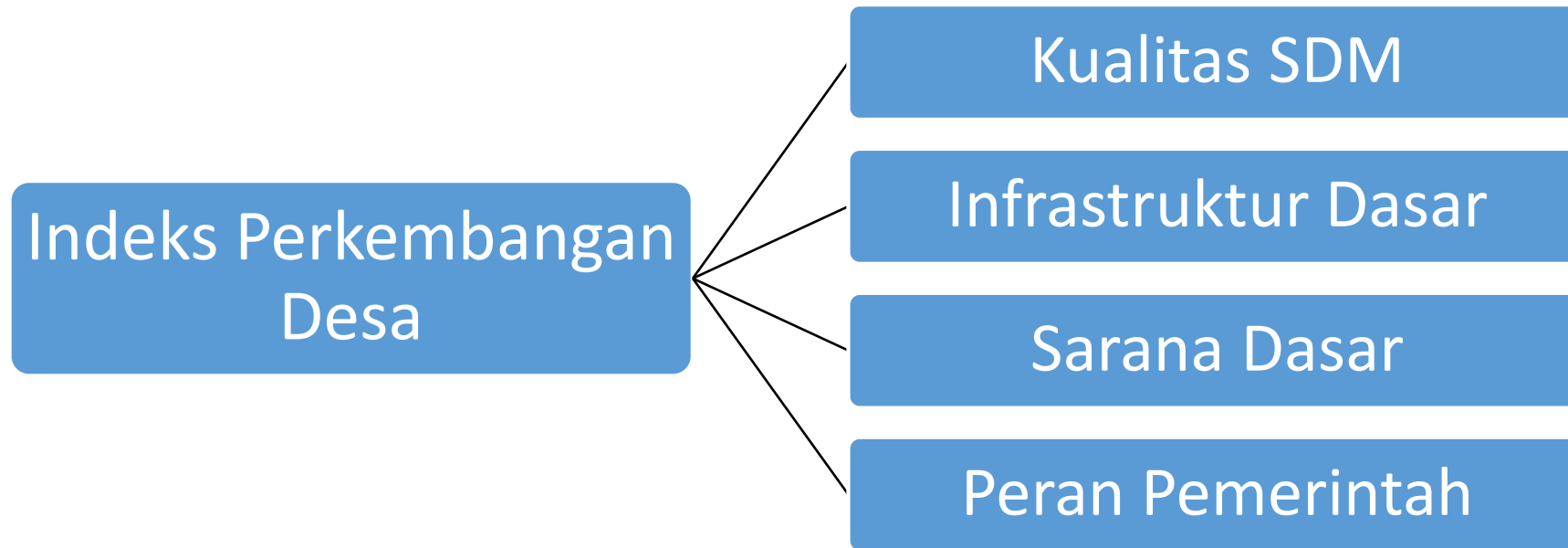
Pelayanan Publik (P.7 (3))

- Dalam hal ini penyediaan pelayanan publik adalah “Dimensi *Mandatory* dari Pemerintah dan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat di desa.”
- Pelayanan Publik Terdiri dari Penyediaan Tenaga Pelayanan Masyarakat seperti Pendidikan (Guru), Kesehatan (Dokter umum, Dokter spesialis, Bidan, & Paramedis); Tenaga Penyuluh Teknis/ Pendamping Masyarakat.

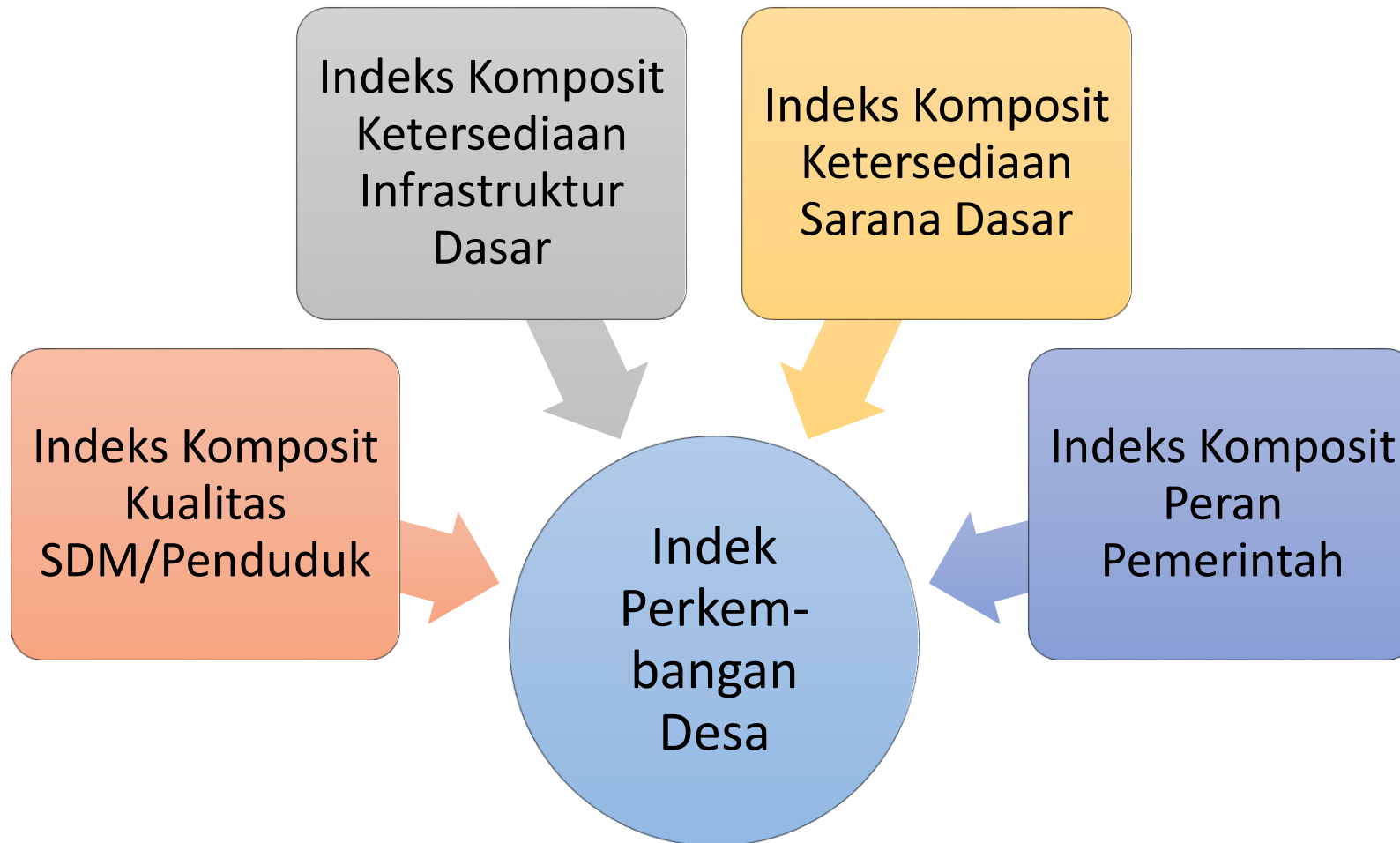
MENGUKUR PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DESA

- Memahami alat ukur pembangunan Desa
- Indeks Desa Membangun

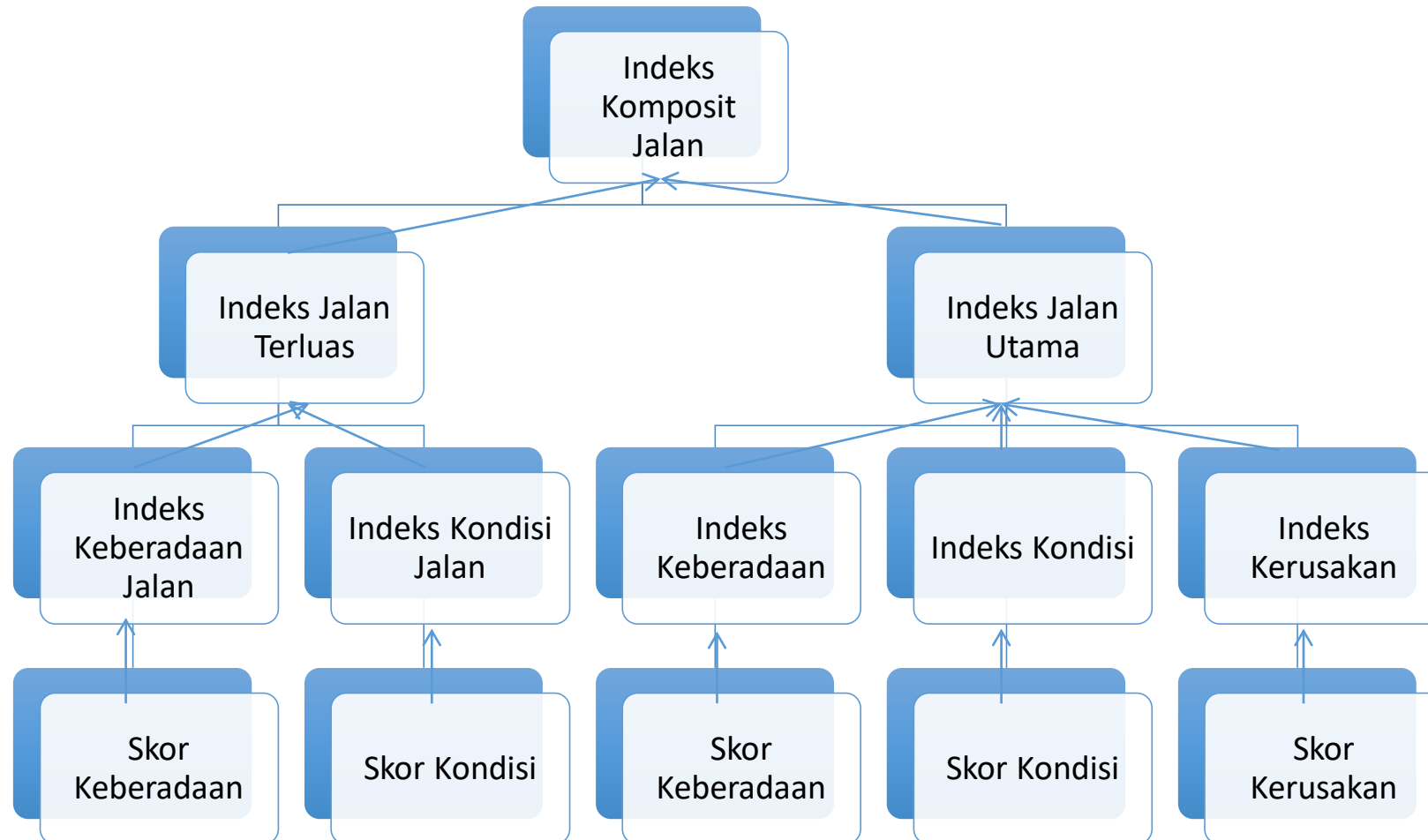
Variabel Indeks Perkembangan Desa



Penyusunan Indeks Perkembangan Desa



Contoh Tahapan Penyusunan Indeks Komposit Variabel Infrastruktur Dasar



Diskripsi Desa Tertinggal, Berkembang, dan Mandiri

DESA TERTINGGAL	DESA BERKEMBANG	DESA MANDIRI
<p>Desa yang dengan ciri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rasio KK miskin lebih dari 20%2. Ketersediaan Infrastruktur dasar dan sarana dasar kurang dari 50%.3. Kecukupan tenaga pelayanan masyarakat kurang dari 50%	<p>Desa dengan ciri-ciri:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rasio KK miskin antara 20% s/d 10%2. Ketersediaan Infrastruktur dasar dan sarana dasar antara 50% s/d 75%.3. Kecukupan tenaga pelayanan masyarakat antara 50% s/d 75%	<p>Desa dengan ciri-ciri</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rasio KK miskin kurang dari 10%2. Ketersediaan Infrastruktur dasar dan sarana dasar lebih dar 75%.3. Kecukupan tenaga pelayanan masyarakat lebih dari 75%

Tujuan Dan Manfaat “Perkembangan Desa”

1. Merumuskan ukuran-ukuran kinerja/pencapaian pembangunan desa;
2. Merumuskan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan desa;
3. Membantu merumuskan kebijakan/program prioritas dalam pembangunan desa;
4. Membantu merumuskan/menentukan Kementerian/Lembaga yang terkait dalam pembangunan desa;
5. Membantu dalam merumuskan target (jumlah, lokus, dan fokus) pembangunan desa; dan
6. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa.

Pengertian “Perkembangan Desa”

- 1. Desa Tertinggal.** Desa yang belum terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur, sarana, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2. Desa Berkembang.** Desa yang sudah terpenuhi SPM namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan.
- 3. Desa Mandiri.** Desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan.

IDM atau IPD ? Atau....???

- Indeks mana yang harus menjadi acuan?
- Masing-masing indeks digunakan untuk kepentingan apa?
- Apa beda filosofi di antara keduanya?
- Apa kelebihan dan kekurangannya?
- Bolehkah Kabupaten membuat ukuran sendiri?
- Bilamana jika membuat ukuran tersendiri?

IDM

Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan **SOSIAL, EKONOMI DAN EKOLOGI**. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat.

SPIRIT UNDANG-UNDANG DESA

- Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik membangun Indonesia dari Desa
- Berdasar UU Desa tersebut, perubahan kehidupan Desa digerakan dalam kerangka kerja: pengertian dan jenis Desa (yakni Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain), tujuan pengaturan, azas-azas, kedudukan, kewenangan, keuangan dan asset, tata pemerintahan, kelembagaan masyarakat dan adat, pemberdayaan masyarakat Desa, pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, dan berikut dukungan pendamping Desa dan sistem informasi Desa.

KLASIFIKASI DAN STATUS DESA MENURUT IDM

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI	INDEKS
1	DESA SANGAT TERTINGGAL	$\leq 0,491$
2	DESA TERTINGGAL	$> 0,491 - \leq 0,599$
3	DESA BERKEMBANG	$> 0,599 - \leq 0,707$
4	DESA MAJU	$> 0,707 - \leq 0,815$
5	DESA MANDIRI	$> 0,815$

INDIKATOR IDM



IPD

Indeks Pembangunan Desa disusun untuk melihat perkembangan desa di Indonesia

IPD dimaksudkan sebagai instrumen :

- a. Perencanaan pembangunan desa di Indonesia
- b. Monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa
- c. Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional 2015-2019 di Indonesia

Dimensi dan variabel IPD

Dimensi dan variabel IPD didasarkan pada

- Data Potensi Desa
- UU 6 tahun 2014 (UU Desa), khususnya pasal 74 (kebutuhan pembangunan desa) dan 78 (tujuan pembangunan desa)

5 dimensi IPD

1. PELAYANAN DASAR
2. KONDISI INFRASTRUKTUR
3. AKSESIBILITAS/TRANSPORTASI
4. PELAYANAN UMUM
5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

INOVASI DALAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN DESA

- Menemu Kenali Masalah di Desa Masing-masing
- Menggunakan indikator Pembangunan Desa dalam menyusun perencanaan
- Membangun dan mengembangkan kreatifitas
- Fokus pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi

Menemu Kenali masalah yang ada di Desa

- Menggali potensi dan masalah yang ada di Desa
- Visi Misi Kepala Desa
- Filosofi Dasar penyusunan RPJMDES

Memfaatkan Data IDM

- Mengetahui Status Desa dalam IDM
- Fokus pada aspek apa yang menjadi penting untuk meningkatkan nilai IDM
- Apakah aspek “Sosial, Ekonomi atau Ekologi”?

Menumbuhkan Kreativitas

- Butuh kreativitas dalam mengelola Desa
- Butuh terobosan-terobosan khusus dalam menyelesaikan masalah di Desa
- Manfaatkan teknologi dalam membangun kreativitas

Peningkatan Layanan Sosial Dasar

- Butuh tenaga-tenaga sukarelawan Desa
- Menumbuhkan spirit gotong royong dalam menyelesaikan masalah sosial di Desa
- Membuat sistem pelayanan publik yang “beda” dari yang selazimnya

Penumbuhan Ekonomi Desa

- Mampu membaca peluang dan potensi ekonomi desa (SDM, SDA, dll)
- Mampu merumuskan usaha (BUMDES) yang mampu menjangkau ke setiap lapisan masyarakat.
- Tidak hanya berorientasi pada aspek profit, tapi juga benefit
- Mampu menyusun bisnis model
- Mampu membuat studi kelayakan usaha

Menjaga keseimbangan Alam dan Lingkungan

- Pembangunan harus diorientasikan pada pembangunan berkelanjutan
- Memahami peta potensi bencana guna mengantisipasi keseimbangan alam.
- Secara kreatif, bisa menggunakan kebijakan desa untuk mengendalikan eksploitasi alam guna menjaga keseimbangan ekosistem

TERIMA KASIH